

Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024

Wahyu Pangestu (1), Dwiki Adi Putra (2), Isabella (3)

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, +62 813-4667-7819

Email Korespondensi: wahyupngstu09@gmail.com, dwiki@uigm.ac.id, isabella@uigm.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembuatan kolam retensi dan penanggulangan masalah banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mencakup beberapa pendekatan yang membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat dengan mudah menggambarkan hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, dalam penyelesaian masalah banjir dan perbaikan kolam retensi di kota Palembang masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator penelitian, yaitu aktivitas implementasi dan komunikasi antar lembaga yang masih sangat minim. Beberapa instansi sudah memahami peran dan fungsinya dalam penanggulangan banjir, namun pelaporan terkait masalah banjir dari masyarakat mendapat respon yang lambat dari instansi yang menangani masalah tersebut. Selanjutnya, dalam segi karakteristik agen pelaksana dalam menanggapi permasalahan banjir, upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, peranan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan penanggulangan bencana banjir. Masyarakat kalangan menengah ke atas yang memiliki pendidikan yang baik dianggap lebih mengerti dan dapat mendukung pemerintah dalam program penanggulangan bencana banjir. Terakhir, pada indikator kecenderungan atau disposisi pemerintah, hingga saat ini dianggap masih kurang tanggap dalam mengambil tindakan atas permasalahan banjir yang terjadi di Kota Palembang. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya perbaikan sistem pelaporan masyarakat, tugas dan fungsi pemerintah Kota Palembang perlu diperjelas, transparansi pada pola kebijakan penanggulangan, serta peningkatan kepercayaan publik.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Banjir, Kolam Retensi, Kota Palembang

Abstract: The purpose of this research is to find out how local government policies towards the creation of retention ponds and overcoming flooding problems in Palembang City. This research uses qualitative research methods, which include several approaches that help researchers understand and explain social phenomena. By using this method, it is expected that researchers can easily describe the results of the research. Researchers used observation, interviews, and documentation to collect data. The results showed that the implementation of policies carried out by the Palembang City Government, in this case the Palembang City Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) together with the Palembang City Regional Disaster Management Agency (BPBD), in solving the problem of flooding and repairing retention ponds in Palembang city still has many shortcomings. This can be seen from several research indicators, namely implementation activities and inter-agency communication which are still very minimal. Some agencies already understand their roles and functions in flood management, but reporting related to flooding problems from the community gets a slow response from the agency handling the problem. Furthermore, in terms of the characteristics of implementing agents in responding to flood problems, the efforts made have been quite good. In the indicators of social, economic and political conditions, the role of the community greatly influences flood disaster management activities. Middle to upper class people who have a good education are considered to understand better and can support the government in flood disaster management programs. Finally, on the indicator of government tendency or disposition, until now it is still considered less responsive in taking action on flood problems that occur in Palembang City. Suggestions that can be given by researchers are the need to improve the community reporting system, the duties and functions of the Palembang City government need to be clarified, transparency in the pattern of countermeasure policies, and increased public trust.

Keywords: Government Policy, Flood, Retention Pond, Palembang City

Article History :

Received 23-01-2025; Revised 17-02-2025; Accepted 23-03-2025

PENDAHULUAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam mitigasi bencana banjir. Secara geografis, Palembang berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 8 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya rentan terhadap genangan air akibat curah hujan tinggi serta pasang surut Sungai Musi. Sungai Musi, yang membelah Kota Palembang menjadi dua bagian, memiliki peran penting dalam sistem drainase alami kota. Namun, seiring dengan meningkatnya urbanisasi, tata kelola air di kota ini mengalami tekanan besar akibat penyempitan daerah resapan air, buruknya sistem drainase, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air (Rahmadi dalam Kamil, 2023).

Dalam teori hidrologi, banjir merupakan kondisi ketika jumlah air yang melampaui kapasitas tampungan suatu wilayah mengakibatkan genangan yang berlebihan. Banjir dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain banjir bandang, banjir akibat pasang surut, dan banjir akibat curah hujan tinggi yang tidak dapat terserap oleh tanah atau sistem drainase yang ada. Faktor utama penyebab banjir meliputi perubahan penggunaan lahan, degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta buruknya infrastruktur drainase perkotaan (Ramadhan, 2024).

Sebagai kota bersejarah di Indonesia, Palembang telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari pusat perdagangan, kota dengan benteng (pergudangan), pusat komersial, hingga kota dengan pemukiman etnik yang terpisah, serta kota bergaya kolonial *Indische* (Nuruddin, 2024). Sistem drainase di Palembang, baik yang berasal dari saluran maupun sungai, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi air Sungai Musi. Akibatnya, banjir yang sering kali terjadi, khususnya di Kota Palembang, disebabkan oleh saluran air yang kurang baik, rendahnya permukaan tanah, dan luapan dari Sungai Musi akibat hujan ekstrem (Rahmadi dalam Kamil, 2023).

Banjir di Kota Palembang bukanlah fenomena baru. Hampir setiap musim hujan, berbagai wilayah di kota ini mengalami genangan yang menghambat aktivitas masyarakat serta menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Penyebab utama banjir di Palembang meliputi tingginya curah hujan, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, meningkatnya jumlah permukiman di daerah rawan banjir, berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan, serta pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat saluran air. Dampak banjir yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang cukup besar.

Untuk mengatasi banjir, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya, antara lain normalisasi sungai dan saluran air, pembangunan kolam retensi, serta penyediaan pompa untuk mengendalikan genangan air. Dalam teori pengelolaan sumber daya air, kolam retensi adalah salah satu strategi yang efektif dalam mengendalikan banjir dengan menampung kelebihan air hujan sebelum dialirkan secara bertahap ke saluran utama (Suprayogi et al., 2024). Kolam retensi berfungsi sebagai wadah atau area yang menyimpan atau meresapkan air sementara. Terdapat dua jenis kolam retensi, yaitu kolam alami dan kolam buatan (Andayani, 2017). Pemerintah Kota Palembang telah membangun beberapa kolam retensi untuk mengurangi banjir, dengan total 46 kolam retensi yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 100-120 kolam retensi (Antara.com, 2024).

Menurut laporan Detik.com (2024), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang telah melakukan inspeksi dan menandai beberapa area jalan utama yang mengalami genangan akibat hujan deras. Beberapa daerah yang sering terdampak banjir antara lain Simpang V DPRD Provinsi

Sumsel, Simpang Polda dari arah Jalan Angkatan 45, Demang Lebar Daun, Kolonel H. Burlian, dan Simpang Yayasan IBA. Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga melakukan tindakan seperti membersihkan saluran drainase, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta menyiapkan tim gawat darurat untuk menyisir daerah rawan banjir (Khalik, 2022).

Untuk mengatasi masalah banjir, Pemerintah Kota Palembang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2013, yang mencakup normalisasi dan perbaikan daya tampung saluran air, pembangunan minimal 48 kolam penampungan air, penyediaan pompa untuk pengelolaan banjir, perbaikan sungai dan pembangunan dinding penahan air minimal 5 km setiap tahun, serta penyediaan lahan untuk pembangunan rumah pompa dan kolam penampungan air. Karena keterbatasan anggaran, pembangunan kolam retensi sesuai target masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemerintah mengharapakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat (Lestari, 2023).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan banjir di Kota Palembang meliputi terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini antara lain meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan (Simbolon, 2024).

Pengelolaan banjir di Kota Palembang membutuhkan pengelolaan infrastruktur air, termasuk normalisasi sungai, pembangunan sistem pompa pengendali banjir, pembenahan saluran drainase, dan pembuatan kolam retensi. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung aliran air, mengurangi terjadinya genangan, serta menekan potensi terjadinya banjir, terutama selama musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan terencana, diharapkan Kota Palembang dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana banjir, sekaligus meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi. Keberhasilan implementasi berbagai solusi ini tidak hanya bergantung pada penguatan infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan kerja sama antar lembaga terkait dalam mengelola risiko banjir secara holistik (Rohekan, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab banjir di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir yang berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan banjir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana banjir di Kota Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko banjir.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024”. Penelitian ini akan menelaah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani banjir, mengidentifikasi efektivitas kebijakan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana perbaikan dan pengelolaan kolam retensi berkontribusi terhadap pengurangan risiko banjir di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024”, ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor (1975)

dalam (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018), mengartikan metode kualitatif sebagai metode yang dapat menghasilkan data deskriptif melalui rangkaian kata tertulis maupun lisan dari orang yang menjadi target pengamatan. Kemudian menurut (Nazir 1998, 63) dalam (Mulyadi, 2012) penelitian deskriptif merupakan sebuah pendekatan untuk mendapatkan suatu informasi, gambaran, atau lukisan yang bersifat sistematis dan berdasarkan fakta.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 550, dengan unit analisis yang mencakup perwakilan dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari serta masyarakat yang terdampak banjir. Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang memberikan data melalui wawancara, terdiri dari pemerintah daerah Kota Palembang dan instansi terkait yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan penyelesaian masalah banjir serta pembangunan kolam retensi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang terdiri dari 2 orang dari Sekretariat Kota Palembang, 3 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta 5 masyarakat yang terdampak banjir. Unit analisis dan informan mencakup Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah; Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi; Seksi Perencanaan Tata Ruang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; serta perwakilan dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari. Selain itu, masyarakat yang terdampak banjir juga menjadi bagian dari narasumber utama dalam penelitian ini.

Adapun Variabel dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (A. I. Pratama & Yuningsih, 2023), yang terdiri dari Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antara Organisasi, Karakteristik Dari Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, dan Kecenderungan (*Disposition*) Dari Pelaksana/Implementor.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap penyelesaian masalah banjir dan perbaikan kolam retensi di Kota Palembang bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik antara instansi terkait dan masyarakat, sehingga memberikan dampak penyelesaian yang optimal. Selain itu, karakteristik agen pelaksana atau implementor juga berperan dalam menjalankan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah setelah tahap perumusan kebijakan. Penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan, karena pertimbangan-pertimbangan ini dapat memastikan kelancaran pelaksanaannya. Selain itu, kecenderungan (*disposition*) dari implementor harus diperhatikan agar kebijakan yang disusun dapat selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dan memberikan dampak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk mengamati serta mencatat setiap kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pembuatan kolam retensi dan penanggulangan masalah banjir di Kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung menggunakan metode wawancara yang tidak terstruktur, spontan, dan terbuka (Gusnawan, 2016). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh selama penelitian guna mendukung, menambah kepercayaan, serta memperkuat pembuktian hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan sering digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu kebijakan berhasil diimplementasikan di lapangan. Teori ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dengan menggunakan sejumlah indikator untuk menilai efektivitasnya. Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan dalam teori Van Meter dan Van Horn yang dapat diterapkan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan banjir dan perbaikan kolam retensi di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024. Adapun variabel dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi

Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Pratama & Yuningsih, 2023), yang terdiri dari Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antara Organisasi, Karakteristik Dari Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, dan Kecenderungan (Disposition) Dari Pelaksana/Implementor.

1. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antara Organisasi

Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi dalam penanggulangan banjir dan perbaikan kolam retensi di Kota Palembang menunjukkan adanya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas PUPR Kota Palembang, BPBD Kota Palembang, dan Koalisi Kawali Indonesia Lestari. Dinas PUPR Kota Palembang memiliki peran utama dalam mengidentifikasi dan menangani penyebab banjir melalui observasi langsung di lokasi terdampak, sementara BPBD Kota Palembang berperan dalam pencegahan serta koordinasi untuk mitigasi bencana. Kedua instansi tersebut aktif dalam menangani banjir dengan merespons laporan masyarakat serta melakukan pemantauan mandiri di lapangan guna menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan banjir dan perbaikan kolam retensi.

Meskipun kondisi banjir di Kota Palembang saat ini relatif terkendali, masih terdapat beberapa titik rawan banjir, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi. Dinas PUPR dan BPBD terus berupaya untuk menangani masalah ini secara cepat dan tepat agar dampaknya dapat diminimalisir. Laporan dari masyarakat mengenai banjir cukup banyak, baik melalui aduan langsung maupun media sosial, namun instansi terkait lebih mengandalkan pemantauan langsung sebagai dasar utama dalam menentukan tindakan penanggulangan. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatifnya di masa mendatang.

2. Karakteristik Dari Agen Pelaksana/Implementor

Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan penanggulangan banjir di Kota Palembang sangat menentukan efektivitas implementasi program yang dijalankan. Dinas PUPR Kota Palembang sebagai lembaga teknis berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai upaya pengendalian banjir. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat keahlian tenaga pelaksana, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi dengan instansi lain dan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan meliputi perbaikan sistem drainase, pemeliharaan serta pengerukan kolam retensi, dan pemetaan titik rawan banjir untuk tindakan mitigasi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian banjir berjalan optimal dan mampu mengurangi dampak genangan air pada kawasan-kawasan yang rentan terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis yang memadai, serta hambatan koordinasi antarinstansi yang terkadang menghambat efektivitas program yang telah dirancang.

Selain faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam mendukung efektivitas program penanggulangan banjir. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut serta dalam program gotong royong menjadi faktor pendukung dalam keberlanjutan program pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya edukasi dan kepedulian masyarakat menyebabkan masih banyaknya permasalahan drainase yang tersumbat akibat sampah, sehingga menghambat aliran air dan memperburuk kondisi banjir di beberapa titik rawan.

Penyebab utama banjir yang ditemukan di Kota Palembang antara lain tersumbatnya drainase akibat sedimentasi dan sampah, kurangnya daerah resapan air akibat tingginya pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur, serta pendangkalan kolam retensi yang menyebabkan daya tampung air menjadi berkurang. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan sinergi antar instansi terkait, optimalisasi penggunaan anggaran, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki peran penting dalam proses penanggulangan banjir di Kota Palembang. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat, serta bagaimana respons masyarakat terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Dari aspek sosial, masyarakat di Kota Palembang memiliki karakteristik yang beragam. Di beberapa kawasan, terutama kompleks perumahan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pengendalian banjir lebih tinggi, sehingga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Namun, di kawasan padat penduduk dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah, terdapat tantangan dalam menyosialisasikan kebijakan. Beberapa masyarakat masih kurang memahami manfaat dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan cenderung lebih kritis terhadap intervensi pemerintah, terutama jika proses pembangunan mengganggu aktivitas mereka.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian masalah banjir. Beberapa proyek membutuhkan investasi yang besar, seperti pembangunan atau rehabilitasi sistem drainase, pengerukan kolam retensi, dan pembuatan daerah resapan air. Kawasan dengan daya beli tinggi cenderung lebih cepat mendapatkan solusi, sementara daerah dengan tingkat ekonomi rendah sering kali mengalami keterlambatan dalam penyelesaian masalah banjir akibat keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan.

Sementara itu, aspek politik juga turut berperan dalam efektivitas kebijakan. Dinamika politik di tingkat lokal dapat mempengaruhi kebijakan penanggulangan banjir, baik dalam hal alokasi anggaran, prioritas proyek, maupun kepemimpinan dalam mengambil tindakan. Dalam beberapa kasus, isu banjir dapat menjadi perhatian politis, terutama dalam periode menjelang pemilu atau pergantian kepemimpinan daerah.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang beragam di Kota Palembang menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat di berbagai lapisan sosial, mempercepat respons terhadap permasalahan banjir, serta memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, upaya pengendalian banjir di Kota Palembang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas.

4. Kecenderungan (*Disposition*) dari Pelaksana/Implementor

Kecenderungan atau *disposition* mencerminkan sikap masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah dalam menangani permasalahan banjir di Kota Palembang. Secara umum, masyarakat memiliki harapan tinggi agar pemerintah dapat lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Banjir yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah padat penduduk, memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti gangguan aktivitas sehari-hari dan kerusakan properti. Oleh karena itu, masyarakat menuntut adanya langkah konkret dan sistematis dalam mengatasi banjir, baik melalui perbaikan infrastruktur drainase, pembangunan daerah resapan air, maupun pemeliharaan sistem pengelolaan air yang lebih efektif.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lingkungan dan masyarakat setempat, masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan implementasi kebijakan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan banjir secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, dengan fokus pada solusi jangka panjang dan perbaikan sistem drainase yang lebih optimal. Upaya ini harus diiringi dengan koordinasi yang baik antara instansi terkait serta pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mengurangi dampak banjir secara signifikan.

Secara keseluruhan, pemerintah hingga saat ini dianggap masih kurang tanggap dalam mengambil tindakan atas permasalahan banjir yang terjadi di kota Palembang. Masyarakat menilai masih banyaknya lokasi-lokasi yang terkena banjir apalagi pada saat hujan turun. Hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat merasa pemerintah perlu lebih lagi dalam menyelesaikan permasalahan banjir di kota Palembang ini dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya permasalahan banjir di kota Palembang dapat minimalisir sehingga tidak terdapat lagi bermasalahan banjir di kota Palembang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan banjir dan perbaikan kolam retensi di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan dari pelaksana kebijakan.

Koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas PUPR Kota Palembang dan BPBD Kota Palembang, telah berjalan dengan baik dalam menangani permasalahan banjir. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa titik-titik rawan banjir yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Komunikasi antar organisasi dan respons terhadap laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas langkah-langkah penanggulangan.

Dari aspek karakteristik agen pelaksana, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keahlian tenaga teknis, transparansi pengambilan keputusan, serta koordinasi yang baik antara instansi dan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis yang memadai, serta hambatan koordinasi antar instansi yang dapat menghambat efektivitas program yang telah dirancang. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan drainase juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini, terutama dalam pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur drainase dan kolam retensi. Dari sisi sosial, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pengendalian banjir masih beragam, yang memerlukan edukasi lebih lanjut. Faktor politik juga berperan dalam menentukan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap percepatan implementasi kebijakan.

Kecenderungan pelaksana atau disposition menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam menangani banjir. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan agar program penanggulangan banjir dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan efektivitas kebijakan dengan pendekatan jangka panjang, perbaikan sistem drainase yang lebih optimal, serta koordinasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Palembang. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas respons terhadap permasalahan ini dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah

perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi seperti Dinas PUPR dan BPBD agar penanggulangan banjir lebih sinergis dan cepat. Strategi pengalokasian anggaran yang efisien serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik dan infrastruktur juga harus dioptimalkan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga drainase, tidak membuang sampah sembarangan, dan berpartisipasi dalam mitigasi bencana harus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi seperti sistem deteksi dini, sensor pemantauan, dan aplikasi pengaduan dapat membantu respons real-time. Partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan juga penting agar solusi lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti ruang terbuka hijau dan daerah resapan air harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir. Dengan demikian, permasalahan banjir dapat diminimalisir sehingga dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.

REFERENSI

- Antara.com (2022). Mengurai masalah banjir di Palembang. <https://www.antaraneews.com/berita/3180989/mengurai-permasalahan-banjir-di-palembang>
- Detiknews. (2021). Fakta Mengejutkan dari Banjir Palembang yang Renggut Nyawa. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-5871782/fakta-mengejutkan-dari-banjir-palembang-yang-renggut-nyawa>
- Detiksumbagsel.com (2023). 13 Titik di Palembang Banjir, Saluran Diperkecil Ditutup Jadi Biang Kerok. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7290345/13-titik-di-palembang-banjir-saluran-diperkecil-ditutup-jadi-biang-kerok>
- Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang. (2022). Peta Sebaran Banjir Kota Palembang. <https://bappedalitbang.palembang.go.id/petasebaran>
- Kamil, E. M., Asysyauki, A. H., & Diem, A. F. (2023). Urban Design Approach to Flood Problem in Palembang City. *Jurnal TekstuReka*, 1(1), 14-24.
- Khalik, M. (2022). Normalisasi Sungai dalam Rangka Pencegahan Banjir oleh Dinas PUPR di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Lestari, M. A. (2023). Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang sebagai Pembangunan Prioritas. *Lex LATA*, 4(3).
- Nuruddin. (2024). Serpihan Sejarah Kota Palembang. In M. S. Pratama (Ed.), *Airlangga University Press* (1st ed., Vol. 1).
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 38 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang.
- Pratama, A. I., & Yuningsih, N. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu ...*, 5(2), 562–585. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/205%0Ahttps://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/cegah-kasus-perkawinan-anak-pemprov-jabar-lakukan-kolaborasi-multipihak>
- Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palembang.
- Ramadhan, S. (2024). Optimalisasi Saluran Drainase Sekunder Untuk Menanggulangi Genangan Di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 24(2), 233–240. <https://doi.org/10.35965/eco.v24i2.4631>
- Rohekan, A. B. (2018). Banjir Sering Melanda Palembang Ternyata Sejak Dahulu Begini Keadaannya. *Tribun Sumsel*. <https://sumsel.tribunnews.com/2018/12/03/banjir-sering-melanda->

palembang-ternyata-sejak-dahulu-begini-keadaannya?page=

Simbolon, H. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, IPDN).

Suprayogi, S. ... Darmanto, D. (2024). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. In *Gajah Mada University Press*.